



Analisis IT Governance SIPKD di Kantor Pemerintahan Kota Tanjung Pinang Pendekatan COBIT Framework

Tukino¹

¹Universitas Putera Batam, email: mas.kino@gmail.com

Abstrak

Kantor Pemerintahan Kota Tanjung Pinang dalam pelaksanaan tanggung jawab yang dimilikinya tersebut, maka muncul beberapa permasalahan dalam implementasinya, seperti sistem kerja yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah berlandaskan pada birokrasi yang kaku. Sehingga terjadi interaksi yang kompleks antara lembaga-lembaga negara, masyarakat, dan dunia usaha dengan pemerintah karena proses yang panjang, lambat dan rumit. Penelitian ini membahas tentang kondisi tata kelola teknologi informasi di Kantor Pemerintahan Kota Tanjung Pinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Kantor Pemerintahan Kota Tanjung Pinang telah menerapkan tata kelola TI yang baik. Fokus Penelitian ini hanya pada 2 dominan COBIT 5.0 yaitu PO dan ME terdiri dari 80 detailed control objective sementara domain AI dan DS telah dinilai memenuhi standar pengelolaan teknologi informasi yang baik yaitu pada level 3 (defined). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner, wawancara dan observasi secara langsung. Ketiga metode tersebut berpatokan pada model COBIT 5.0. Hasil pengolahan kuisioner mendapati nilai rata-rata untuk domain PO dan ME adalah 2,5 dari rentang nilai 0 sampai 5. Artinya Kantor Pemerintahan Kota Tanjung Pinang telah melakukan tata kelola teknologi informasi dengan baik.

Kata kunci: COBIT 5.0, Tata Kelola Teknologi Informasi

Abstract

Government offices City of Tanjung Pinang in the implementation of the responsibility it has, it appears some problems in implementation, such as the working system which is currently implemented by the Government based on rigid bureaucracy. So there is interaction complex between state agencies, communities, and businesses with the government because the process is long, slow and complicated. This research aims to discuss the condition of information technology governance. It intends to determine the extent to which that office has implemented good IT governance. This research focuses on the two dominant COBIT 5.0 versions, PO and ME. They consist of 80 detailed control objectives while the AI and DS domain has been judged to meet the good management standards of information technology at level 3 (defined). The data was collected using a questionnaire, rated by the supervisors, interviews and direct observations. The three methods of data collection were based on the Model COBIT 5.0. The results of the processing of the questionnaire found an average value for the domain of the PO and ME is 2.5 from the value range 0 to 5. Means the Government of the City of Tanjung Pinang has conducted information technology governance.

Keywords: COBIT 5.0, Information Technology Governance

1. Pendahuluan

Peranan pemerintah dalam pengelolaan SI/ TI merupakan hal tidak bisa dipisahkan dalam manajemen keberadaan SI/ TI sebagai pendukung proses bisnis. Proses bisnis yang terdapat dalam Kantor Pemerintahan Kota Tanjung Pinang berbasis SI/ TI itu sendiri mencakup tiga kategori, antara lain standar, guideline dan procedure (ISACA, 2006). Itulah sebabnya procedure ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kebijakan otonomi daerah yaitu Pemerintah Daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan [2]. Dengan demikian Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab akan kemajuan daerah setempat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya [1].

Penerapan sistem *e-government* sendiri, telah diperintahkan oleh Presiden yaitu pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* yang menginstruksikan kepada: Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota untuk Mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing- masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden.

Selain Pemerintah Pusat, dengan adanya instruksi Presiden tersebut maka semua Pemerintah Daerah juga ikut berlomba memberikan pelayanan perijinan yang lebih transparan dengan mengaplikasikan sistem *e-government* tersebut. Begitu pula dengan Kantor Pemerintahan Kota Tanjung Pinang, turut menerapkan sistem *e-government*. Penerapan *e-government* yang dilakukan oleh Kantor Pemerintahan Kota Tanjung Pinang guna untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam otonomi daerah yang juga dialami oleh Pemerintah Daerah Kantor Pemerintahan Kota Tanjung Pinang, dimana kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat masih dirasakan kurang maksimal dan perlu adanya perbaikan-perbaikan. Akan tetapi dalam pelaksanaan penerapan sistem *e-government* di Kantor Pemerintahan Kota Tanjung Pinang, terdapat kendala dalam penyediaan sistemnya.

Agar menjamin manajemen mencapai tujuan bisnisnya, maka harus mengatur dan mengarahkan kegiatan TI dalam mencapai keseimbangan yang efektif antara mengatur resiko dan mendapatkan keuntungan. Untuk melaksanakannya, manajemen perlu mengidentifikasi kegiatan terpenting. Selain itu, perlu juga kemampuan mengevaluasi tingkat kesiapan organisasi terhadap praktek terbaik dan standar internasional. Untuk mendukung kebutuhan manajemen tersebut, pedoman manajemen COBIT (*COBIT Manajemen Guidelines*) telah secara khusus mengidentifikasi CSF, KGI, KPI dan model maturity untuk pengaturan TI [3].

2. Kajian Pustaka

COBIT pada umumnya didasarkan pada tujuan pengendalian (*Control Objectives*) ISACF dan telah ditingkatkan dengan teknik internasional yang ada, professional, pengaturan, dan standar khusus industri. Hasil tujuan pengendalian telah dikembangkan untuk aplikasi sistem informasi yang luas pada organisasi. Istilah “pada umumnya dapat diterima dan diterapkan” secara eksplisit digunakan dalam pengertian yang sama dengan prinsip *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) [4].

Menurut [6] dalam jurnal [5] COBIT (*Control Objectives For Information and Related Technology*) adalah seperangkat pedoman umum (*best practice*) untuk manajemen teknologi informasi yang dibuat oleh *Information System Audit and Control Association* (ISACA) dan *IT Governance Institute* (ITGI) pada tahun 1996.

Konsep dasar kerangka kerja COBIT adalah bahwa penentuan kendali dalam TI berdasarkan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung tujuan bisnis dan informasi yang dihasilkan dari gabungan penerapan proses TI dan sumber daya terkait. Dalam penerapan pengelolaan TI terdapat dua jenis model kendali, yaitu model kendali bisnis (*business controls model*) dan model kendali TI (*IT focused control model*), COBIT mencoba untuk menjembatani kesenjangan dari kedua jenis kendali tersebut [7].

[4], menyatakan *IT Governance* merupakan konsep yang berkembang dari sektor swasta, namun dengan berkembangnya penggunaan teknologi informasi oleh organisasi pemerintahan maka *IT Governance* juga harus diterapkan pada sektor ini. Peranan *IT Governance* dalam pencapaian tujuan suatu organisasi yang mengadopsi TI tidaklah diragukan lagi, *IT Governance* pada intinya adalah kegiatan pengelolaan penggunaan TI agar menghasilkan keluaran yang maksimal dalam organisasi, membantu proses pengambilan keputusan dan membantu proses pemecahan masalah.

Tata kelola TI mengatur semua *stakeholder* yang berinteraksi dengan organisasi. Transparansi pada setiap *stakeholder* sangat dibutuhkan seperti: peran, pengaruh, dan tugas dari setiap pihak yang bersangkutan. Peran, pengaruh, dan tugas setiap *stakeholder* ini tidak sama diantara satu organisasi dengan yang lainnya. Pada industri yang sama dengan kepemilikan yang berbeda, misalnya yang satu milik pemerintah dan yang satu milik swasta, akan memiliki tekanan yang berbeda dari setiap *stakeholder* [5].

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan *auditable*. Tampilan SIPKD dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

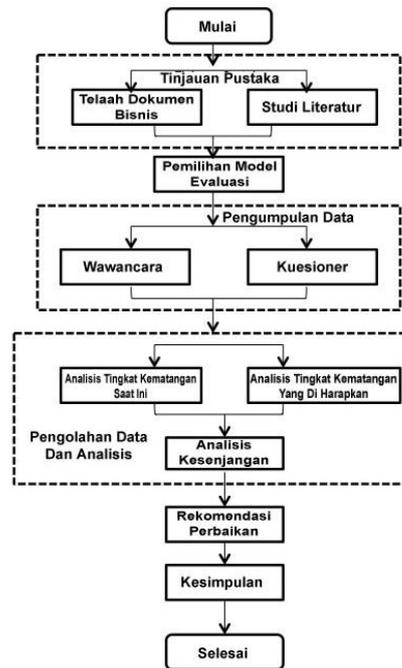


Gambar 1. Tampilan SIPKD

Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan SIPKD dilaksanakan dalam rangka membantu memudahkan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan akuntansi dan pelaporan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menjelaskan cara penelitian dimana terdapat rincian tentang bahan atau materi, alat, urutan langkah-langkah yang dibuat secara sistematis, logis sehingga dapat dijadikan pedoman yang jelas dan mudah untuk menyelesaikan permasalahan, analisis hasil dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Urutan langkah-langkah penelitian penyelesaian masalah dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini:



Gambar 2. Alur Penelitian

Studi kepustakaan diharapkan mampu menggali seluruh informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dan obyek yang menjadi tujuan penelitian. Studi kepustakaan ini memberikan dasar bagi arah penelitian yang akan dilakukan serta menjadi awal pemikiran bagi setiap peneliti sehingga penelitian yang dilakukan dapat dijadikan acuan kembali dikemudian hari.

4. Hasil Dan Pembahasan

A. Identifikasi Proses Teknologi Informasi

Pada tahap ini, menetapkan proses teknologi informasi yang sesuai dengan standar COBIT yang telah diolah sesuai dengan studi kasus. Adapun susunan menurut domainnya, maka proses teknologi informasi di kantor Pemerintahan Kota Tanjung Pinang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Deskripsi Proses Teknologi Informasi

<i>IT Domain</i>	<i>IT Process</i>
<i>Plan and Organise</i>	<i>PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7, PO8, PO9, PO10</i>
<i>Acquire and Implementation</i>	<i>AI1, AI4, AI5, AI6, AI7</i>
<i>Deliver and Support</i>	<i>DS1, DS2, DS3, DS4, DS5, DS6, DS7, DS8, DS9, DS11, DS12, DS13</i>
<i>Monitor and Evaluation</i>	<i>ME1, ME2, ME3, ME4</i>

Analisis dilakukan dengan meninjau dari hasil pemodelan COBIT 5.0 yang telah dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Sebagai salah satu tujuan dalam tulisan ini adalah untuk menemukan bagian mana saja proses yang masih dibawah *level 3* dan sudah mencapai *level 3* sehingga dapat dilakukan perbaikan dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan dengan mengacu pada hasil pemodelan. Bagian domain yang masih kurang dan belum matang akan diteliti lebih rinci. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dimana penulis telah berusaha untuk mencari tahu bagian-bagian yang memiliki kesenjangan tertentu antara keempat domain yang berlaku. Sehingga penulis menetapkan hanya meneliti pada pada dua domain PO dan ME. hasil prapenelitian juga menunjukkan bahwa AI dan DS telah mencapai *level 3 (Defined Process)* sedangkan hasil pada PO dan ME masih pada *level 2.56*. Tujuan yang diharapkan pada tingkat kematangan pada kantor Pemerintahan Kota Tanjung Pinang untuk periode tahun 2013 sampai tahun 2016 adalah pada *level 3* sehingga penelitian ini akan mengutamakan

memembahas pada topik “*are we doing the right things?*” dan “*Are we getting the benefits?*” yang berhubungan dengan PO dan ME.

Tabel 2. Evaluasi Proses Teknologi Informasi pada Kantor Pemerintahan Kota Tanjung Pinang

<i>IT Domain</i>	<i>IT Process</i>
<i>Plan and Organise</i>	<i>PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7, PO8, PO9, PO10</i>
<i>Monitor and Evaluation</i>	<i>ME1, ME2, ME3, ME4</i>

Adapun deskripsi tiap-tiap teknologi informasi proses adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar IT Proses Kantor Pemerintahan Kota Tanjung Pinang.

<i>Domain</i>	<i>Descripts (Plan and Organise)</i>
<i>PO1</i>	<i>Define a Strategic IT Plan.</i>
<i>PO2</i>	<i>Define The Information Architecture.</i>
<i>PO3</i>	<i>Determine Technological Direction.</i>
<i>PO4</i>	<i>Define The IT Processes, Organisation And Relationships.</i>
<i>PO5</i>	<i>Manage The IT Investment.</i>
<i>PO6</i>	<i>Communicate management aims and direction.</i>
<i>PO7</i>	<i>Manage IT Human Resources.</i>
<i>PO8</i>	<i>Manage Quality.</i>
<i>PO9</i>	<i>Assess And Manage IT Risks.</i>
<i>PO10</i>	<i>Manage Projects.</i>
<i>Domain</i>	<i>Descripts (Monitor and Evaluate)</i>
<i>ME1</i>	<i>Monitor And Evaluate IT Performance</i>
<i>ME2</i>	<i>Monitor And Evaluate Internal Control</i>
<i>ME3</i>	<i>Ensure Compliance With External Requirements</i>

B. Menentukan Tingkat Kematangan

Penentuan tingkat kematangan (*maturity level*) bukan hanya menggambarkan pengukuran sejauh mana instansi telah memenuhi standar proses pengelolaan teknologi informasi yang baik. Lebih jauh lagi, tingkat kedewasaan tersebut seharusnya dapat digunakan untuk peningkatan kesadaran akan kepentingan peningkatan pengelolaan proses teknologi informasi sekaligus mengidentifikasi prioritas dalam peningkatan yang dilakukan. Tingkat kematangan yang dimaksud merupakan representasi kematangan/kedewasaan proses teknologi informasi yang berlangsung di instansi (dalam bentuk nilai/angka). Adapun penentuan tingkat kematangan akan dilakukan pada tiap proses teknologi informasi dan dilakukan terhadap semua *level*, mulai dari *level 0* (nol) atau *non-existence*, hingga *level 5* (lima) atau *optimised*, melalui kuisioner dan wawancara langsung perihal pelaksanaan proses teknologi informasi dengan divisi teknologi informasi di kantor Pemerintahan Kota Tanjung Pinang. Di dalam penelitian ini penulis menjelaskan setiap proses dan *level* menurut COBIT 5.0, dibandingkan dengan yang ada di instansi untuk kemudian diambil kesimpulannya.

C. Perhitungan Tingkat Kematangan

➤ PO1 Define a Strategic IT Plan

Hasil Perhitungan dari domain PO1 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Perhitungan Evaluasi PO1

Domain	Keterangan	Hasil Perhitungan
<i>PO1.1</i>	<i>IT Value Management</i>	2.7
<i>PO1.2</i>	<i>Business-IT Alignment</i>	2.6
<i>PO1.3</i>	<i>Assessment of Current Capability and Performance</i>	2.7
<i>PO1.4</i>	<i>IT Strategic Plan</i>	2.5
Rata-Rata		2.6

➤ PO2. Define the Information Architecture

Hasil Perhitungan dari domain PO2 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Perhitungan Evaluasi PO2

Domain	Keterangan	Hasil Perhitungan
PO2.1	<i>Enterprise Information Architecture Model</i>	2.7
PO2.2	<i>Enterprise Data Dictionary and Data Syntax Rules</i>	2.4
PO2.3	<i>Data Classification Scheme</i>	2.3
PO2.4	<i>Integrity Management</i>	2.5
Rata-Rata		2.4

➤ **PO3. Determine Technological Direction**

Hasil Perhitungan dari domain PO3 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Perhitungan Evaluasi PO3

Domain	Keterangan	Hasil Perhitungan
PO3.1	<i>Technological Direction Planning</i>	2.7
PO3.2	<i>Technology Infrastructure Plan</i>	2.6
PO3.3	<i>Monitor Future Trends and Regulations</i>	2.6
PO3.4	<i>Technology Standards</i>	2.1
PO3.5	<i>IT Architecture Board</i>	2.4
Rata-Rata		2.5

➤ **PO4. Define the IT Processes, Organization and Relationships**

Hasil Perhitungan dari domain PO4 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Perhitungan Evaluasi PO4

Domain	Keterangan	Hasil Perhitungan
PO4.1	<i>IT Process Framework</i>	2.5
PO4.2	<i>IT Strategy Committee</i>	2.4
PO4.3	<i>IT Steering Committee</i>	2.8
PO4.4	<i>Organizational Placement of the IT Function</i>	2.1
PO4.5	<i>IT Organizational Structure</i>	2.5
PO4.6	<i>Establishment of Roles and Responsibilities</i>	2.5
PO4.7	<i>Responsibility for IT Quality Assurance</i>	2.7
PO4.8	<i>Responsibility for Risk, Security and Compliance</i>	2.4
PO4.9	<i>Data and System Ownership</i>	2.8
PO4.10	<i>Supervision</i>	2.8
PO4.11	<i>Segregation of Duties</i>	2.9
PO4.12	<i>IT Staffing</i>	2.8
Rata-Rata		2.6

➤ **PO5. Manage the IT Investment**

Hasil Perhitungan dari domain PO5 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.8. Hasil Perhitungan Evaluasi PO5

Domain	Keterangan	Hasil Perhitungan
PO5.1	<i>Financial Management Framework</i>	2.4
PO5.2	<i>Prioritization Within IT Budget</i>	2.7
PO5.3	<i>IT Budgeting</i>	2.4
PO5.4	<i>Cost Management</i>	2.6
PO5.5	<i>Benefit Management</i>	2.7
Rata-Rata		2.5

➤ **PO6. Communicate Management Aims and Direction**

Hasil Perhitungan dari domain PO6 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Perhitungan Evaluasi PO6

Domain	Keterangan	Hasil Perhitungan
PO6.1	<i>IT Policy and Control Environment</i>	2.5
PO6.2	<i>Enterprise IT Risk and Control Framework</i>	2.6
PO6.3	<i>IT Policies Management</i>	2.6
PO6.4	<i>Policy, Standard and Procedures Rollout</i>	2.6
PO6.5	<i>Communication of IT Objectives and Direction</i>	2.8
Rata-Rata		2.6

➤ **PO7. Manage IT Human Resources**

Hasil Perhitungan dari domain PO7 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 10. Hasil Perhitungan Evaluasi PO7

Domain	Keterangan	Hasil Perhitungan
PO7.1	Personnel Recruitment and Retention	2.5
PO7.2	Personnel Competencies	2.6
PO7.3	Staffing of Roles	2.6
PO7.4	Personnel Training	2.7
PO7.5	Dependence Upon Individuals	2.5
PO7.6	Personnel Clearance Procedures	2.6
PO7.7	Employee Job Performance Evaluation	2.5
PO7.8	Job Change and Termination	2.7
Rata-Rata		2.6

➤ **PO8. Manage Quality**

Hasil Perhitungan dari domain PO8 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 11. Hasil Perhitungan Evaluasi PO8

Domain	Keterangan	Hasil Perhitungan
PO8.1	Quality Management System	2.3
PO8.2	IT Standards and Quality Practices	2.3
PO8.3	Development and Acquisition Standards	2.8
PO8.4	Customer Focus	2.4
PO8.5	Continuous Improvement	2.4
PO8.6	Quality Measurement, Monitoring and Review	2.3
Rata-Rata		2.4

➤ **PO9. Assess and Manage IT Risks**

Hasil Perhitungan dari domain PO9 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 12. Hasil Perhitungan Evaluasi PO9

Domain	Keterangan	Hasil Perhitungan
PO9.1	IT Risk Management Framework	2.3
PO9.2	Establishment of Risk Context	2.3
PO9.3	Event Identification	2.4
PO9.4	Risk Assessment	2.4
PO9.5	Risk Response	2.8
PO9.6	Maintenance and Monitoring of a Risk Action Plan	2.5
Rata-Rata		2.4

➤ **PO10. Manage Projects**

Hasil Perhitungan dari domain P10 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 13. Hasil Perhitungan Evaluasi P10

Domain	Keterangan	Hasil Perhitungan
PO10.1	Program Management Framework	2.4
PO10.2	Project Management Framework	2.3
PO10.3	Project Management Approach	2.5
PO10.4	Stakeholder Commitment	2.5
PO10.5	Project Scope Statement	2.6
PO10.6	Project Phase Initiation	2.5
PO10.7	Integrated Project Plan	2.4
PO10.8	Project Resources	2.7
Rata-Rata		2.5

❖ **ME1. Monitor and evaluate IT Performance**

Hasil Perhitungan dari domain ME1 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 14. Hasil Perhitungan Evaluasi ME1

Domain	Keterangan	Hasil Perhitungan
<i>ME1.1</i>	<i>Monitoring Approach</i>	2.4
<i>ME1.2</i>	<i>Definition and Collection of Monitoring Data</i>	2.4
<i>ME1.3</i>	<i>Monitoring Method</i>	2.5
<i>ME1.4</i>	<i>Performance Assessment</i>	2.6
<i>ME1.5</i>	<i>Board and Executive Reporting</i>	2.9
<i>ME1.6</i>	<i>Remedial Actions</i>	2.4
Rata-Rata		2.5

❖ **ME2. Monitor and Evaluate Internal Control**

Hasil Perhitungan dari domain ME2 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 15. Hasil Perhitungan Evaluasi ME2

Domain	Keterangan	Hasil Perhitungan
<i>ME2.1</i>	<i>Monitoring of Internal Control Framework</i>	2.3
<i>ME2.2</i>	<i>Supervisory Review</i>	2.4
<i>ME2.3</i>	<i>Control Exceptions</i>	2.6
<i>ME2.4</i>	<i>Control Self-assessment</i>	2.3
Rata-Rata		2.4

❖ **ME3. Obtain Independent Assurance**

Hasil Perhitungan dari domain ME3 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 16. Hasil Perhitungan Evaluasi ME3

Domain	Keterangan	Hasil Perhitungan
<i>ME3.1</i>	<i>Identification of External Legal, Regulatory and Contractual Compliance Requirements</i>	2.1
<i>ME3.2</i>	<i>Optimization of Response to External Requirements</i>	2.1
<i>ME3.3</i>	<i>Evaluation of Compliance With External Requirements</i>	2.4
<i>ME3.4</i>	<i>Positive Assurance of Compliance</i>	2.3
<i>ME3.5</i>	<i>Integrated Reporting</i>	2.6
Rata-Rata		2.3

❖ **ME4. Provide IT Governance**

Hasil Perhitungan dari domain ME4 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 17. Hasil Perhitungan Evaluasi ME4

Domain	Keterangan	Hasil Perhitungan
<i>ME4.1</i>	<i>Establishment of an IT Governance Framework</i>	2.6
<i>ME4.2</i>	<i>Strategic Alignment</i>	2.6
<i>ME4.3</i>	<i>Value Delivery</i>	2.8
Rata-Rata		2.7

Rata-rata hasil perhitungan dari domain dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 18. Rata-rata Tingkat Kematangan Domain PO Dan ME

Domain	Keterangan Domain	Nilai	Kondisi
PO1	Define a Strategic IT Plan.	2.6	Defined Process
PO2	Define The Information Architecture.	2.4	Repeatable But Intuitive
PO3	Determine Technological Direction.	2.5	Defined Process
PO4	Define The IT Processes, Organisation And Relationships	2.6	Defined Process
PO5	Manage The IT Investment.	2.5	Defined Process
PO6	Communicate Management Aims And Direction.	2.6	Defined Process
PO7	Manage IT Human Resources.	2.6	Defined Process
PO8	Manage Quality.	2.4	Repeatable But Intuitive
PO9	Assess And Manage IT Risks.	2.4	Repeatable But Intuitive
PO10	Manage Projects.	2.5	Defined Process
ME1	Monitor And Evaluate IT Performance	2.5	Defined Process
ME2	Monitor And Evaluate Internal Control	2.4	Repeatable But Intuitive
ME3	Ensure Compliance With External Requirements	2.3	Repeatable But Intuitive
ME4	Provide IT Governance	2.7	Defined Process
Rata-Rata		2.5	Defined Process

Hasil perhitungan mendapati rata-rata nilai domain tata kelola teknologi informasi pada kantor Pemerintahan Kota Tanjung Pinang sebesar 2.5. Dari nilai ini dapat tarik kesimpulan bahwa pengelolaan teknologi informasi dilakukan secara *Defined Process* artinya pada level ini, proses standar dalam pengembangan suatu produk baru sebagian telah didokumentasikan, proses ini didasari pada proses pengembangan produk yang telah diintegrasikan. Proses-proses ini digunakan untuk membantu manajer, ketua tim dan anggota tim pengembangan sehingga bekerja dengan lebih efektif. Aturan dan tanggung jawab yang sudah sebahagian didefinisikan jelas dan dimengerti. Karena proses perangkat lunak belum seluruhnya didefinisikan dengan jelas, maka manajemen mempunyai pengetahuan tidak lengkap mengenai kemajuan proyek tersebut. Biaya, jadwal dan kebutuhan proyek dalam pengawasan dan kualitas produk yang diawasi. Meskipun demikian tata kelola pada kantor keagenan masih pada level terendah pada level kematangan. Level ini masih pada transisi antara *Repeatable but Intuitive* menuju *Defined Process*. Masih dibutuhkan banyak perbaikan yang harus dilakukan pada domain (PO2, PO8, PO9, ME2, ME3) karena ke lima domain ini masih pada level *Repeatable but Intuitive* artinya pada level ini, kebijakan untuk mengatur pengembangan suatu proyek dan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut belum ditetapkan seluruhnya.

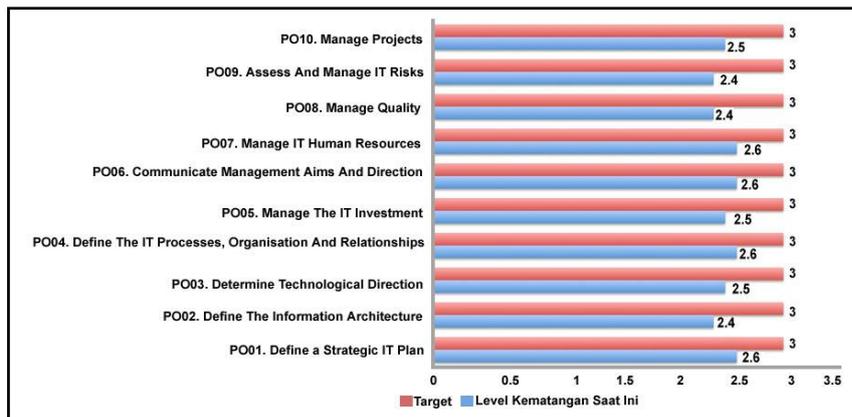
D. Nilai Kesenjangan Kematangan Saat ini

Setelah menilai dan mengetahui tingkat kematangan tata kelola saat ini sebesar 2.5 maka dilakukan analisis kesenjangan terhadap tingkat kematangan yang diharapkan yaitu sebesar 3. Analisa ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagai pengelolaan teknologi informasi yang serasi diantara ke-4 domain. Alasan nilai yang ingin dicapai sebesar 3 adalah melihat kesiapan kantor dalam bidang tata kelola manajemen, pengelolaan SDM dan Keuangan. Fokus Kantor Pemerintahan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2014 masih pada pembangunan fisik gedung sehingga dana dalam perbaikan dan pengembangan teknologi informasi menjadi terbatas. Tabel dibawah ini menunjukkan gap antara tingkat kematangan saat ini dengan tingkat kematangan yang diharapkan:

Tabel 19. Perbandingan Tingkat Kematangan Saat Ini Dan Tingkat Kematangan Yang Diharapkan

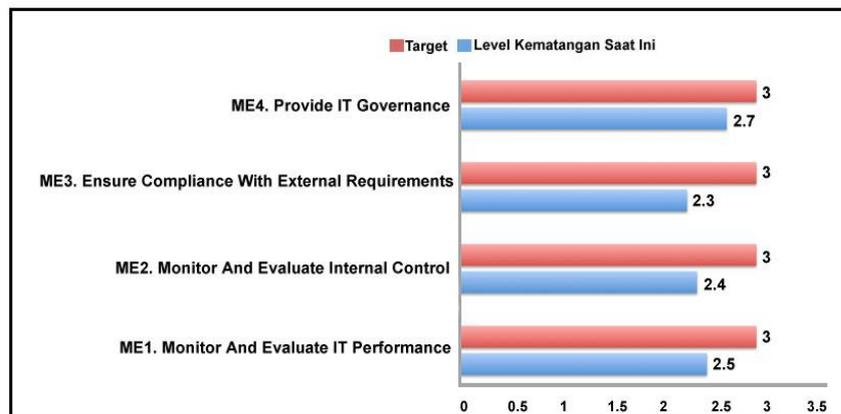
Domain	Tingkat Kematangan		
	Saat Ini	Diharapkan	Gap (Diharapkan-Saat ini)
PO	2.5	3	$3.0 - 2.5 = 0.5$
ME	2.5	3	$3.0 - 2.5 = 0.5$
Rata-Rata			$(0.5+0.5)/2 = 0.5$

Terdapat Jarak 0.5 pada domain PO dan ME, antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi saat ini. Walaupun gap terbilang kecil tetapi dibutuhkan penyesuaian masing-masing domain karena nilai 0.5 adalah nilai rata-rata perdomain, maka penulis akan tetap akan memberikan rekomendasi pada masing masing sub domain sehingga perbaikan lebih fokus pada bagian domain yang lemah. Perbedaan kondisi kesenjangan tata kelola PO saat ini dengan tata kelola PO yang diharapkan dapat dilihat seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 3. Perbandingan Kesenjangan Kondisi Tata Kelola PO Saat Ini Dengan Tata Kelola Yang Diharapkan

Perbedaan kondisi kesenjangan tata kelola ME saat ini dengan tata kelola ME yang diharapkan dapat dilihat seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 4. Perbandingan Kesenjangan Kondisi Tata Kelola ME Saat Ini Dengan Tata Kelola Yang Diharapkan

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintahan Kota Tanjung Pinang telah menerapkan tata kelola teknologi informasi pada *Level Defined Process*. Hasil pengolahan kuisisioner mendapati nilai rata-rata untuk domain PO dan ME adalah 2,5 dari rentang nilai 0 sampai 5. Artinya Pemerintahan Kota Tanjung Pinang telah melakukan tata kelola teknologi informasi dengan baik.
2. Hasil penelitian menemukan kelemahan terdapat pada subdomain PO2, PO8, PO9, ME2 dan ME3. Ke lima domain ini hanya mampu memperoleh nilai rata rata 2,38 artinya masih pada *Level Repeatable But Intuitive*. Beberapa kelemahan yang paling fatal adalah tingginya ketergantungan Pemerintahan Kota Tanjung Pinang terhadap satu ahli, risiko tidak dikelola dengan baik, belum melakukan evaluasi terhadap kepuasan mutu, dokumentasi belum dilakukan dibeberapa bidang TI, prosedur dan kebijakan belum dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Daftar Pustaka

- [1] Djumiarti. *Sistem Informasi Manajemen* (Buku Ajar, pp. 1–104). Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2008.
- [2] Undang-Undang_NO_32. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta, Indonesia: Republik Indonesia, 2004.
- [3] Herri, S. *IT Governance & Penggunaan COBIT Framework*, 2(2), 219–237, 2010.
- [4] Noorhasanah, Wing Wahyu Winarno, Dani Adhipta. *Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Berbasis Framework COBIT 5*. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2015 ISSN: 2302-3805, STMIK AMIKOM Yogyakarta, 6–8, Februari 2015.
- [5] Ahmad Syamsudin, Emha Taufiq Lutfi. *Evaluasi Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri Menggunakan Framework COBIT 5*. Seminar Nasional TI dan Multimedia 2014, STMIK AMIKOM Yogyakarta 19 Februari 2014, ISSN 2302-3805.
- [6] Jogiyanto dan Willy Abdillah, *Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- [7] Dewi Ciptaningrum, Eko Nugroho, Dani Adhipta. *Audit Keamanan Sistem Informasi pada Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta Menggunakan COBIT 5*. SENTIKA 2015, ISSN: 2089-9815, Yogyakarta, 28 Maret 2015.